KAJIAN KEBIJAKAN PAPEDA INSTITUTE

PETA KEKERASAN, KHUSUSNYA KRIMINALITAS, DI KOTA JAYAPURA PAPUA (JANUARI 2014-JUNI 2014)

PAPUA PEACE AND DEVELOPMENT ACTION (PaPeDA) INSTITUTE

KOTA JAYAPURA
PRASETYA ADI KARYA

The Habibie Center

DESEMBER 2014

PAPUA PEACE
AND DEVELOPMENT ACTION
(PaPeDA) INSTITUTE

KAJIAN KEBIJAKAN PAPEDA INSTITUTE

PETA KEKERASAN, KHUSUSNYA KRIMINALITAS, DI KOTA JAYAPURA PAPUA (JANUARI 2014-JUNI 2014)

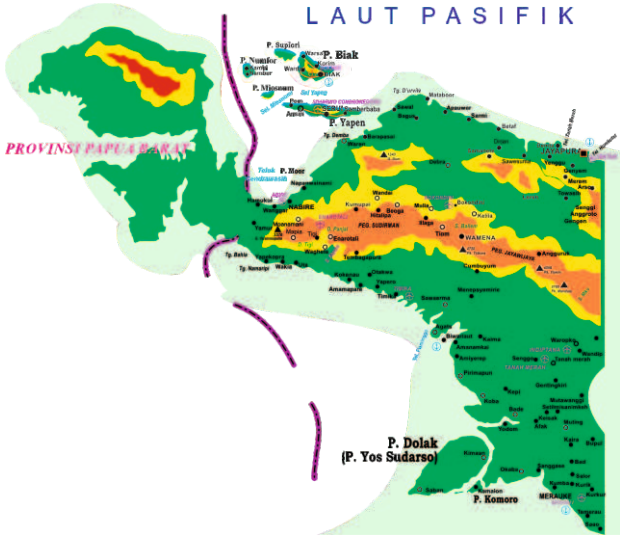

PAPUA PEACE AND DEVELOPMENT ACTION (PaPeDA) INSTITUTE

DESEMBER 2014

The Habibie Center

KAJIAN KEBIJAKAN PAPEDA INSTITUTE

PETA KEKERASAN, KHUSUSNYA KRIMINALITAS, DI KOTA KAYAPURA PAPUA

(JANUARI 2014-JUNI 2014)

Hak Cipta @ PaPeDA Institute dan The Habibie Center

Cetakan Desember 2014

Penyelaras Akhir :
Ridwan al-Makassary (PaPeDA Institute)
Tim Kerja:
Penanggung Jawab : Toni Wanggai
Konsultan : Imron Rosyid
Sopar Peranto
Ketua Tim : Ridwan al-Makassary
Peneliti : Elizabeth Christin Waromi
Imelda Ajeng Alik
Tim Inti : Evert Merauje (Kesbangpol & Linmas Pemkot Jayapura)
Edi Ohoiwutun (Sekretaris LMA Port Numbay)
Burhanuddin (Kemenag Kota Jayapura)
La Margono (Kabid HAM Kemenkum HAM Jayapura)
Nelson Wanggai (Aktivis NGO Jayapura)
Prabowo (Anggota Kodam XVII/Cenderawasih Papua)
Yorgen Numberi (Staf Komnas HAM Papua)

Desain Cover dan Tata Letak: Studio Mangga Dua Art (Jl. Marthin Indey No.1 Jayapura)

Diterbitkan oleh
PaPeDA Institute dan The Habibie Center

PENGANTAR

Keamanan adalah satu kebutuhan dasar manusia (*human basic need*). Dewasa ini di kota Jayapura yang kita cintai, masalah kriminalitas sedang mengintai dan bahkan menjarah rasa aman kita. Dengan demikian, rasa aman adalah hal yang tengah terusik di tengah geliat kota Jayapura yang sedang berkembang. Selain itu, sebagai sebuah kota yang juga menjadi favorit bagi para migran masalah perkotaan terutama kriminalitas adalah sebuah masalah yang mesti ditangani secara serius.

Dengan argumen sederhana itu, *PaPeDA Institute* dan *The Habibie Center* menerbitkan kajian kebijakan yang di edisi ini adalah "menelisik masalah kriminalitas di kota Jayapura". Diharapkan bahwa kajian ini dapat menyedian sebuah gambaran yang holistik akan persoalan kriminalitas yang sementara membelit kota Jayapura.

Di bawah kepemimpinan Dr Benhur Tommy Mano, MM, walikota Jayapura dan kapolres kota Jayapura upaya-upaya mengeliminir telah digalakkan. Kita mengapresiasi kerja-kerja mereka tersebut. Selanjutnya, kita juga berharap upaya-upaya tersebut didukung juga oleh semua *stakeholders* yang ada untuk mewujudkan kota Jayapura yang aman dan damai. Kajian kebijakan ini adalah sebentuk *sense of careness* dan *sense of belonging* dari PaPeDA Institute untuk membuka mata semua pihak bahwa kriminalitas masih merupakan musuh bersama kita khususnya yang berpijak di tanah *Port Numbay* ini.

Tidak ada gading yang tak retak, mohon maaf atas segala kekurangan.

Selamat membaca.

The Habibie Center

The Habibie Center (THC), sebuah lembaga pemikir terkemuka di Indonesia, didirikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie dan keluarga sebagai organisasi yang independen, non-pemerintah dan nirlaba. THC didirikan dengan visi untuk mempromosikan modernisasi dan demokratisasi masyarakat Indonesia yang didasarkan pada moralitas dan integritas nilai-nilai budaya dan agama.

Misi THC adalah: Pertama, untuk membangun masyarakat yang demokratis secara struktural dan kultural yang mengakui, menghormati dan mempromosikan hak asasi manusia, serta untuk mempelajari dan mengusung isu-isu dalam pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Kedua, untuk mempromosikan dan memajukan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan sosialisasi teknologi

Profil PaPeDA Institute

Papua Peace and Development Action (PaPeDA) Institute adalah salah satu anggota *civil society organization* (CSO) di Jayapura, Papua, yang dibentuk pada 17 Agustus 2010. Kelahirannya dibidani oleh beberapa akademisi dan praktisi yang berwawasan moderat, pluralis dan inklusif.

Raison d'être dari organisasi ini adalah untuk menyahuti dan mengatasi problema eksklusifisme keagamaan, diskriminasi berbasis etnik dan agama, ketidakadilan sosial, ekonomi dan budaya serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Secara khusus, ia juga *concerns* pada persoalan lingkungan serta isu-isu tata kelola dan kelembagaan yang bersih dan baik (*good governance*). Singkatnya, organisasi ini digerakkan oleh mimpi besar untuk membangun sebuah peradaban baru, yaitu untuk terwujudnya Papua Tanah Damai.

Untuk mewujudkan idealita Papua Tanah Damai, organisasi ini mendedikasikan diri pada kegiatan riset, training, advokasi, jejaring serta pertunjukan seni dan budaya terutama di bidang pembangunan perdamaian (*peacebuilding*) dan kegiatan-kegiatan pembangunan (*development actions*) yang nyata di Papua.

Profil Kota Jayapura

Kota Jayapura adalah ibukota provinsi Papua, Indonesia. Kota ini merupakan ibukota provinsi yang terletak paling timur di Indonesia. Kota yang indah ini terletak di teluk Jayapura.

Sebelum Perang Dunia II Kota Jayapura diduduki oleh Pemerintah Belanda dengan sebutan Hollandia. Tepat 17 Maret 1910 Hollandia ditetapkan menjadi ibukota Nederland Nieuw Guinea. Setelah intergrasi dengan Indonesia, Hollandda diubah namanya menjadi Kota Baru, kemudian Soekaroputra dan terakhir dinamakan jayapura sampai sekarang.

Sesuai perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat maka status Kabupaten jayapura dibentuk menjadi kota administratif. Kemudian berdasarkan undang-Undang No.6 tahun 1993 secara resmi status Kota Administratif Jayapura ditingkatkan menjadi Kotamadya Jayapura.

Secara geografis wilayah Kotamadya Jayapura terletak di bagian utara Provinsi Papua, pada 1028'26" - 36058'82" LS dan 137024 10" - 14100" BT.

Kotamadya Jayapura secara Administratif memiliki batasan sebagai berikut :

- Bagian utara dengan Samudera Pasific.
- Bagian barat dengan Kabupaten Jayapura
- Bagian selatan dengan Kecamtan Arso Kabupaten Jayapura.
- Bagian Timur dengan Negara Papua New Guinea

Nama Kota Jayapura pada awalnya adalah Holandia dimana nama tersebut di berikan oleh Kapten Sachse pada tanggal 07 Maret 1910. Apa atri Holandia : Hol = lengkung; teluk land= tanah, tempat yang berteluk. Negeri Belanda atau Holland atau Nederland - geografinya menunjukkan keadaan berteluk-teluk.

Geografi Kota Jayapura hampir sama dengan garis pantai utara negeri Belanda itu. Kondisi alam yang berlekuk-lekuk inilah yang mengilhami Kapten sache untuk mencetuskan nama Hollandia di nama aslinya Numbay. Numbay diganti nama sampai 4 kali: Hollandia-Kotabaru-Sukarnopura--Jayapura, yang sekarang dipakai adalah "Jayapura"

KAJIAN KEBIJAKAN PAPEDA INSTITUTE
PETA KEKERASAN, KHUSUSNYA KRIMINALITAS, DI KOTA JAYAPURA PAPUA (JANUARI 2014-JUNI 2014)

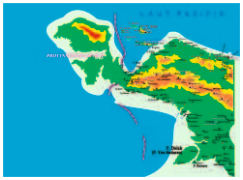

Pengantar

Papua Peace and Development Action (PaPeDA) *Institute* dengan dukungan *the Habibie Center* membuat kajian kebijakan tentang penanganan kekerasan di Papua. Kajian ini menggunakan data program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK), yang digagas oleh Kementerian Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra), bekerjasama dengan Bank Dunia (*The World Bank*) dan *The Habibie Center*.

Untuk edisi perdana ini, *PaPeDA Institute* mengusung tema "Kekerasan, khususnya Kriminalitas di kota Jayapura". Kajian ini dipilih karena berdasarkan data SNPK, tingkat kriminalitas cukup tinggi di kota Jayapura (akan diuraikan di bawah) dan juga telah mengusik rasa aman warga. Selain itu, bertempat di Aula Walikota Jayapura, 23 September 2014, pada acara *coffe morning* yang dihadiri tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda dengan Walikota Jayapura, Dr. Benhur Tommy Mano, MM, masalah kriminalitas menjadi fokus perbincangan ketika itu.

Lebih jauh, kami berargumen bahwa tingkat kriminalitas di kota Jayapura cukup tinggi dengan penyebab yang juga beragam, sehingga penangannya pun mesti melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada untuk mengeliminir tingkat kekerasan hingga titik yang rendah. Masalah ini yang akan didiskusikan secara ekstensif dalam kajian ini, yang diharapkan berguna bagi pemerintah setempat ataupun pihak terkait di kota Jayapura untuk mengeluarkan kebijakan tepat sasaran yang bisa mengeliminir angka kriminalitas ke tingkat yang paling rendah.

Dengan kata lain, untuk mewujudkan kota Jayapura yang aman dan damai sesuai dengan motto kota Jayapura *Hen Tecahi Yo Onomi Te'mar Ni Hanased* (Membangun kota dengan satu hati untuk kemuliaan nama Tuhan), maka kajian kebijakan ini didedikasikan untuk hal tersebut. Namun,sebelum mengkaji SNPK tentang kekerasan, khususnya kriminalitas, di Jayapura, ada baiknya mengetahui profil kota Jayapura secara singkat.

Kota Jayapura: Sebuah Kota Utama

Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua, adalah sebuah kota yang letaknya jauh dari Jakarta, ibukota negara Republik Indonesia, dan metroplis. Lima jam penerbangan langsung dari Jakarta adalah sebuah kenyataan bahwa ia secara geografis lebih dekat ke dunia Melanesia, dan bahkan Australia. Hingga kini, Jayapura merupakan barometer politik, ekonomi, sosial budaya di Papua.

Kota Jayapura memiliki luas 940 km2 dengan populasi sekitar 280,000 jiwa, yang merupakan daerah terpadat di Papua dengan tingkat kepadatan 339 orang / km2 (John Rahail, 24/11/2014). Kota yang terkenal dengan ikon Pantai *Base-G* ini terbagi menjadi 5 Distrik yaitu Abepura (87.280 jiwa), Heram (44.244 jiwa), Jayapura Utara (77. 594 jiwa), Jayapura Selatan (73.243 jiwa) dan Muara Tami (13.649 jiwa). (Lihat Kota Jayapura Dalam Angka Data BPS, 10/11/2014)

Sebagian penduduk terdiri dari migran yang utamanya datang dari berbagai wilayah di Indonesia, dan juga Papua asli, yang sebagian besar bermigrasi ke sini untuk merubah nasib yang lebih baik. Menurut John Rahail (24/11/12014), terdapat 125.213 orang masuk ke Papua selama lima tahun terakhir (5%). Sementara tempat tujuan favorit migran adalah Kab. Sarmi (14,5%) dan Kota Jayapura (12,87%). Di sini, kota Jayapura masih merupakan sebuah kota favorit terutama karena sentra ekonomi yang terus berkembang, menjadi pusat bagi dunia perbankan, Mall Jayapura, rumah makan, tempat hiburan, ruko dan perhotelan. Misalnya, Bank Papua Pusat di Kelurahan Imbi adalah pusat lalu lintas arus keuangan dan Hotel Swiss-Bel, Aston dan Horison adalah hotel-hotel terbaik yang memanjakan pelanggan.

Sebagian penduduk merupakan pekerja kantoran kelas menengah, dan juga sebagian besar adalah mereka yang bekerja di sektor informal dan pelayanan jasa. Meskipun demikian, angka pengangguran cukup tinggi, yaitu, laki-laki mencapai 9,036 jiwa dan perempuan mencapai 5,748 jiwa (http://papua.bps.go.id/index.php?hal=subject&id=9)

Sebagaimana kota-kota migran lain di Indonesia, kehadiran multi etnis di kota ini direfleksikan melalui pembentukan paguyuban (asosiasi kemasyarakatan), mencakup Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Ikatan Keluarga Flobomora untuk orang dari Nusa Tenggara Timur, dan juga asosiasi yang serupa berasal dari Jawa-Madura (HKJM), Bima dan Nusa Tenggara Barat, Batak dan sebagainya. Kota Jayapura sangat plural:

berdasarkan data Kantor Kementrian Agama Kota Jayapura 2012, keyakinan Kristen Protestan: 41.285 jiwa, Kristen Katolik: 21.155 jiwa, Islam: 29.111 jiwa, Hindu: 457 jiwa dan Budha: 685 jiwa. Keragaman etnik dan agama yang berbeda tampaknya menjadikan kota Jayapura sebagai "Indonesia Mini" dan menuntut penataan yang tidak mudah, terutama masalah perkotaan, khususnya kriminalitas.

Data-Data SNPK tentang Kekerasan di kota Jayapura

Dalam memantau kekerasan di Indonesia, SNPK membagi jenis kekerasan menjadi empat kategori besar, yaitu konflik kekerasan, kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam rangka penegakan hukum, kriminalitas, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT (Kotak 1).

Kotak 1. Definisi

Program SNPK memberikan defenisi terhadap jenis-jenis kekerasan sebagai berikut:

Konflik kekerasan adalah jenis kekerasan yang terjadi karena adanya sengketa yang melatarbelakangi atau diperselisihkan dan pihak tertentu yang menjadi sasaran.

Kriminalitas adalah insiden kekerasan yang terjadi tanpa adanya sengketa yang diperselisihkan sebelumnya dan target tertentu

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, dimana anggota keluarga tersebut tinggal satu atap/satu rumah

Kekerasan Dalam Penegakan Hukum adalah seluruh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan formal dalam merespon tindak kriminalitas. Tindakan tersebut termasuk kekerasan yang dianggap sesuai dengan atau melebihi wewenang mereka.

Sementara konflik kekerasan sendiri dibagi menjadi tujuh jenis yaitu konflik terkait sumber daya, konflik tata kelola pemerintahan, konflik pemilihan dan jabatan, konflik separatisme, konflik identitas, main hakim sendiri dan jenis konflik lainnya (Kotak 2).

Kotak 2. Pembagian Jenis Konflik

Program SNPK membagi konflik berkekerasan menjadi beberapa jenis;

Konflik Sumber Daya adalah tindakan kekerasan dipicu oleh sengketa sumber daya (lahan, tambang, akses pekerjaan, gaji, polusi dll)

Konflik Tata Kelola Pemerintah adalah tindakan kekerasan dipicu oleh kebijakan atau program pemerintah (pelayanan publik, korupsi, subsidi, pemekaran dll)

Konflik Pemilihan dan Jabatan adalah tindakan kekerasan dipicu oleh persaingan antara dua pihak berkaitan dengan pemilihan atau jabatan

Konflik Separatisme adalah tindakan kekerasan yang dipicu oleh upaya pemisahan dari NKRI

Konflik Identitas adalah tindakan kekerasan dipicu oleh identitas kelompok (agama, ethnis, suku dll)

Main Hakim Sendiri adalah tindakan kekerasan dipicu oleh masalah balas dendam
(tersinggung, pencurian, hutang, kecelakaan dll)

Konflik Lainnya adalah tindakan kekerasan yang dipicu oleh masalah selain yang ada di daftar SNPK

Berdasarkan klasifikasi yang digunakan SNPK di atas, maka pada periode ini di kota Jayapura telah terjadi 36 insiden konflik kekerasan yang tercatat, 332 insiden kekerasan terkait kriminalitas, 45 insiden KDRT dan 2 insiden terkait kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam upaya penegakan hukum (Lihat Tabel 1).

Lebih jauh, jumlah insiden kekerasan periode ini sebagian besar terkait konflik kekerasan (10%) dengan jumlah insiden 36 yang mengakibatkan 43 korban cedera dan 6 bangunan rusak; kriminalitas (79%) jumlah insiden 332 yang mengakibatkan 6 orang tewas, 235 cedera, 31 korban perkosaan dan 27 bangunan rusak; KDRT (11%) dengan jumlah insiden yang terjadi dalam kasus KDRT berjumlah 45 kasus dan mengakibatkan 6 orang tewas, 42 orang cedera dan korban kekerasan seksual 1 orang (Tabel 1).

Tabel 1.
Jumlah Insiden Konflik kekerasan Serta Dampaknya pada Periode Januari – Juni

Jenis Kekerasan	Jumlah Insiden	Dampak				
		Tewas	Cedera	Penculikan	Kekerasan Seksual	Bangunan Rusak
Sumber Daya	1	0	0	0	0	1
Tata Kelola Pemerintah	4	0	2	0	0	1
Pemilihan dan Jabatan	10	0	4	0	0	3
Identitas	1	0	1	0	0	0
Main Hakim Sendiri	16	0	25	0	0	1
Separatisme	4	4	3	0	0	3
Jumlah Konflik	36	4	35	0		9
Konflik Lain	8	0	11	0	0	0
Penegakan Hukum	2	0	3	0	0	0
Kriminalitas	332	6	235	0	31	27
KDRT	45	3	42	0	1	0
Total	423		326	0	32	36

Berdasarkan table di atas, terdapat beberapa insiden konflik dan kekerasan yang perlu diperhatikan pada periode ini adalah kekerasan terkait dengan konflik main hakim sendiri, konflik separatisme dan juga konflik terkait tata kelola pemerintahan, KDRT serta insiden kriminalitas yang terjadi.

Insiden terkait konflik main hakim sendiri, misalnya, dengan adanya pengeroyokan dan pengrusakan oleh warga terhadap pelaku pencurian, dan juga terhadap seorang supir truk. Sementara insiden terkait konflik separatisme,seperti adanya penembakan yang terjadi di wilayah perbatasan RI-PNG oleh sekelompok orang bersenjata yang merupakan para pejuang Papua merdeka. Pada kategori tata kelola pemerintahan yaitu adanya demonstrasi untuk pembebasan tahanan politik, sedangkan dalam kategori konflik pemilihan dan jabatan ditandai dengan insiden pengrusakan salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di distrik Abepura oleh sejumlah

mahasiswa, insiden yang terakhir tersebut telah menambah jumlah kekerasan terkait konflik pemilihan dan jabatan pada periode ini. Lebih jauh, insiden kekerasan lainnya yang sangat penting pada periode ini adalah tingginya tingkat kriminalitas, yang mengambil bentuk penganiyaan dan pencurian di wilayah tertentu dikota Jayapura.

Sebagaimana disebut di atas, angka insiden kriminalitas terbilang tinggi bila dibandingkan dengan tindak kekerasaan lainnya. Hal tersebut menunjukan bahwa masalah kekerasan, khususnya kriminalitas, di kota Jayapura perlu diperhatikan secara serius. Hal ini akan dieksplor lebih mendalam di bawah.

Pola dan Tren Kekerasan

Pada periode Januari-Juni 2014, angka kekerasan terlihat cukup tinggi pada Januari 2014 (Gambar 2). Pada bulan tersebut, sebagian besar merupakan insiden kriminalitas khususnya tindak penganiyaan. Jika dibandingkan dengan periode Januari-Juni 2013, tren kekerasan pada periode ini cenderung meningkat baik dari segi insiden maupun dampak kekerasan (Gambar 2).

Beberapa insiden yang perlu untuk diperhatikan pada periode ini adalah, sbb: (1) Insiden main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga, (2) Konflik tata kelola pemerintah terkait demonstrasi oleh sejumlah mahasiswa Uncen menuntut pembebasan Tahanan Politik, (3) Konflik terkait separatisme Papua di batas RI-PNG, (4) Tingginya Angka Kriminalitas di beberapa daerah di kota Jayapura.

Gambar 2.
Tren dan dampak Kekerasan di Kota Jayapura
Periode Jan-Juni 2013 dan Jan-Juni 2014

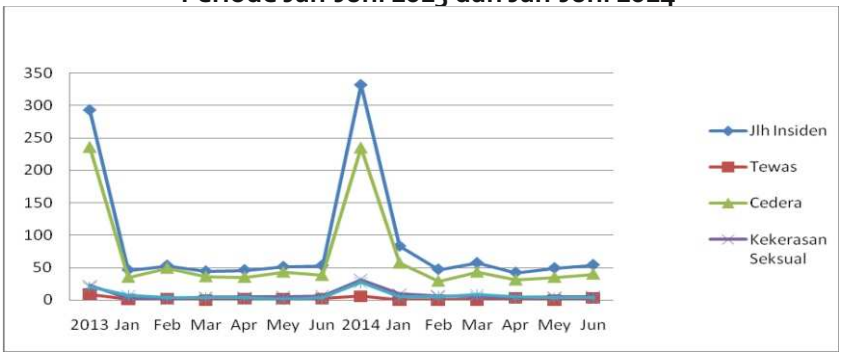

Gambar 3.
Perbandingan Angka Kekerasan Periode Januari-Juni 2013 dan Januari-Juni 2014

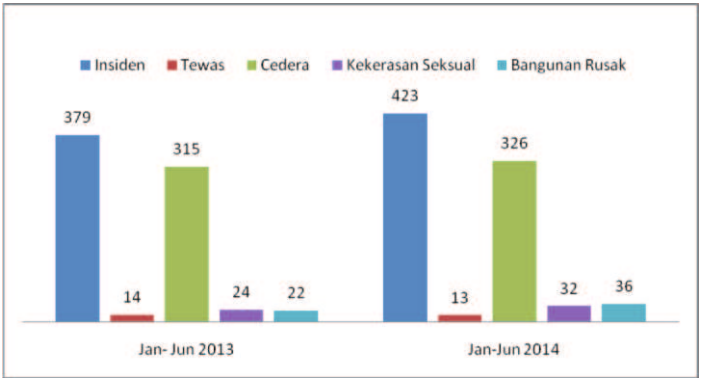

Konflik Kekerasan

Pada periode Januari-Juni 2014 tercatat sekitar 36 insiden konflik kekerasan yang terjadi di kota Jayapura, di mana satu insiden di antaranya merupakan konflik sumber daya yang mengakibatkan 1 bangunan rusak (Lihat Tabel 1). Pada periode ini, konflik juga terjadi karena sengketa lahan tanah antara warga dan salah satu lembaga swasta (Cenderawasih Pos, 18/2/2014).

Dalam pemantauan, pada periode ini terjadi 16 insiden kekerasan terkait main hakim sendiri, yang telah mengakibatkan 25 orang cedera dan 1 bangunan rusak (Lihat Tabel 1). Insiden main hakim sendiri sebagian besar dipicu dari kasus pencurian di mana para pelaku pencurian yang berhasil ditangkap dan dikeroyok warga sebelum diserahkan kepada pihak berwajib. Seperti insiden pengeroyokan didepan Kantor Sinode GKI, Tanah Papua, Desa Argapura, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah warga Argapura kepada MM. Kejadian itu terjadi karena korban kepergok telah melakukan penjambretan terhadap pengendara motor sehingga warga yang melihat langsung memukulinya hingga babak belur (Cenderawasih Pos, 12/04/2014).

Salah satu insiden lainnya dalam kategori main hakim sendiri adalah pengeroyokan yang terjadi di Sekitaran Skyline Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, sekitar pukul 17.30 Rabu (5/2/2014) terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah warga setempat terhadap AO (supir truk) dan 2

temannya yang mengakibatkan ketiganya mengalami luka serius. Kejadian itu terjadi karena sebelumnya korban telah menabrak sejumlah pengendara motor hingga dua orang tewas sehingga warga yang melihat korban hendak melarikan diri langsung mengejar dan mengeroyok ketiganya (Papua Pos, 5/3/2014).

Dalam periode ini juga terdapat konflik separatisme yang terjadi di perbatasan RI-PNG, Wutung, Kec. Muaratami, Kota Jayapura, Papua, hari Sabtu (5/4/2014) sekitar pukul 07.00 WIT, terjadi kontak senjata dan pengrusakan yang dilakukan oleh 30 orang kelompok sipil bersenjata (KSB) dengan 8 Anggota TNI Polri yang berjaga diperbatasan yang mengakibatkan 3 anggota KSB tewas dan 1 Polisi yaitu Kapolres Jayapura Kota (AKBP AP) dan 1 TNI yaitu Serma TU terluka terkena tembakan, selain itu tempat pencucian mobil, reklame, Kantor Kehutanan, dan bendera Merah Putih dibakar serta pagar-pagar besi di sepanjang jalan dan belasan tiang bendera dirobohkan dan sejumlah pohon ditebangi. Motif dari aksi tersebut masih terkait dengan isu teror memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Cenderawasih Pos, 06/04/2014)

Dalam kategori konflik tata kelola pemerintahan, terjadi 4 insiden yang berakibat 2 orang cedera dan satu bangunan rusak. Dalam kategori ini insiden kekerasan dilatarbelakangi oleh ketidakpuasaan atas keputusaan pihak aparat hukum. Di Sekitaran Kampus Uncen di Jalan KampWolker, Kel. Waena, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua, Rabu (2/04/2014). Terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa Uncen yang menuntut pembebasan tahanan politik Papua. Polisi yang mencoba membubarkan para demonstran dilempari dengan batu dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam aksi tersebut (Cenderawasih Pos, 03/04/2014)

Pada periode ini juga terjadi 10 insiden konflik pemilihan dan jabatan, di mana terjadi di TPS 05, Silva Griya RT 2 RW 1, Kel. VIM, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (10/4/2014) jam 02.00 dini hari. Terjadi pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang berjumlah sekitar 30 orang yang mengakibatkan TPS dan fasilitas TPS seperti kursi dan meja, bahkan kotak suara nyaris dirusak dengan sejumlah senjata tajam beruntung polisi langsung bertindak dan mengamankan kotak suara, selain itu 1 rumah dan 1 motor yang berada di dekat TPS yaitu milik II (PNS) dibakar oleh para pelaku hingga keduanya hangus terbakar. Motif pembakaran masih terkait dengan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang diikuti oleh berbagai partai politik (Cenderawasih Pos, 11/04/2014).

Menelisik Kriminalitas di Kota Jayapura

Data SNPK bulan Januari 2014-Juni 2014 mencatat angka kriminalitas telah menembus 332 kasus. Dalam nada yang sama, data yang dimiliki kepolisian (Papare, 2014) dari bulan Januari 2014-Juli 2014 menunjukkan jumlah kriminalitas mencapai 466 kasus . Dari total 466 kasus berdasarkan data kepolisian tersebut 230 kasus yang merupakan kasus penganiyaan, 96 penggeroyokan, 28 kasus KDRT dan beberapa tindak kriminalitas lainnya, 356 kasus tindak kriminal terjadi karena minuman keras (Data Polres Jayapura, 11/11/2014). Sedangkan bentuk kriminalitas lainnya yang terjadi selama periode ini berdasarkan data SNPK adalah penganiyaan (58%), perampokan (31%), pengrusakan (10%) dan perkelahian (1%).(Gambar 4).

Gambar 4
Bentuk Kriminalitas Serta Dampaknya

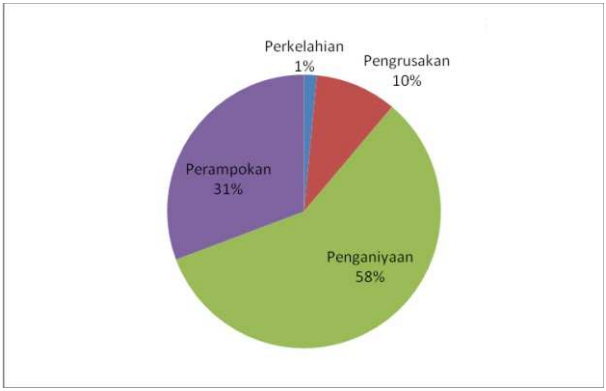

Data SNPK Periode 2005- Juni 2014 menunjukkan angka kriminalitas di kota Jayapura meningkat pesat sejak tahun 2008 (Lihat Gambar 5). Tampaknya hal tersebut terjadi seirama dengan jumlah penduduk yang kian meningkat di kota Jayapura sejak tahun 2008 hingga kini (Data BPS, 11/11/2014). Untuk beberapa derajat, meningkatnya jumlah migrasi penduduk yang datang ke Jayapura dengan kapal putih (baca: Pelni), yang tidak semuanya memiliki ketrampilan untuk memperoleh *income*, berpengaruh pada tingkat kriminalitas di kota Jayapura, akibat lapangan kerja yang terbatas. Karenanya, persoalan migrasi ini perlu dicermati oleh pihak terkait di kota Jayapura

Gambar 5.
Tren Kriminalitas di Jayapura Periode 2005-Juni 2014

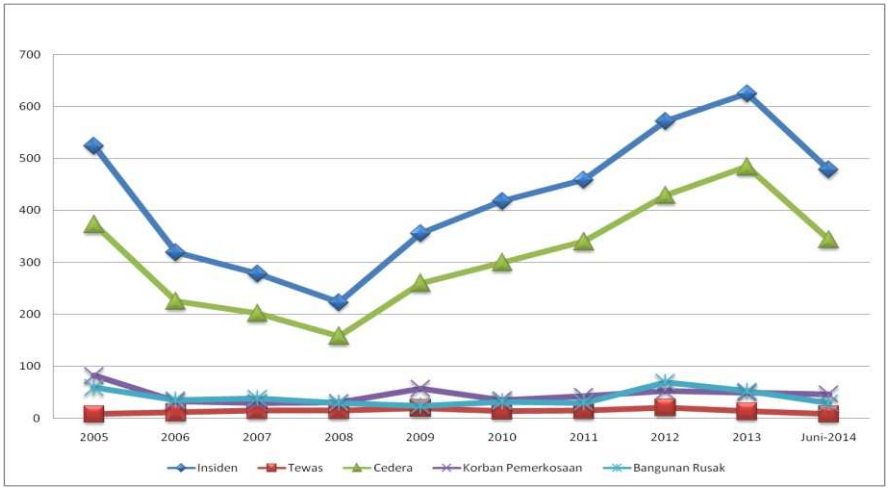

Sebaran insiden kekerasan pada periode ini, berdasarkan data SNPK maupun data kepolisian, menunjukkan beberapa distrik memiliki angka kekerasan yang cukup tinggi jika dibandingkan daerah lainnya di kota Jayapura.Misalnya, distrik Abepura pada periode ini terjadi sekitar 125 tindak kriminalitas yang mengakibatkan 6 orang korban tewas dan 85 orang mengalami cedera.

Abepura merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu mencapai 87.280 jiwa dengan luas wilayah mencapai 155,7 km, distrik Abepura merupakan salah satu distrik dengan jumlah penduduk yang banyak hal tersebut mengakibatkan banyaknya pengangguran sehingga menimbulkan persaingan ekonomi yang cukup tinggi. Konsekuensinya, hal ini tampaknya menjadikan distrik ini rawan dengan tindak kriminalitas. Asumsi tersebut didukung oleh data dari pihak polsek Abepura yang menunjukan angka kriminalitas di wilayah Abepura sangat tinggi khususnya mengenai pencurian dan hal tersebut dipicu oleh Minuman Keras (Miras) dan salah satu faktor pendorongnya adalah tingginya jumlah penduduk (87.280 jiwa), sebagaimana telah disebutkan di profil Kota Jayapura.

Insiden-insiden pencurian yang terjadi didominasi oleh pencurian motor (Curanmor) berdasarkan data kepolisian Abepura tercatat sekitar 200 kejadian pencurian motor yang terjadi pada periode ini dan kasus ini merupakan kasus yang memiliki angka kejadian paling tinggi di wilayah hukum kepolisian Abepura. Sejauh ini pihak kepolisian Abepura telah berusaha melakukan penanganan terhadap kasus-kasus tersebut namun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pihak polsek Abepura tersebut yaitu mengenai kurangnya personil dan juga sarana penunjang lainnya (Data Polsek Abepura dan Wawancara, 20/11/2014).

Daerah tertinggi angka kriminalitas lainnya adalah Distrik Heram yang memiliki luas wilayah 63,2 km dengan populasi 44.244 , dimana terjadi sekitar 97 tindak kriminalitas yang menyebabkan 70 korban cedera (Lihat Tabel 2)

Tabel 2.
Sebaran Wilayah Kriminalitas di Jayapura Januari - Juni 2014

Kecamatan	Jumlah Insiden	Tewas	Cedera	Kekerasan Seksual	Bangunan Rusak
ABEPURA	125	6	85	11	10
HERAM	97	0	70	5	7
JAYAPURA SELATAN	62	0	45	9	3
JAYAPURA UTARA	44	0	34	5	7
MUARA TAMI	2	0	0	0	0
TIDAK ADA	2	0	1	1	0
Grand Total	**332**	**6**	**235**	**31**	**27**

Penganiayaan

Dari total keseluruhan tindak kriminalitas di kota Jayapura baik dari data SNPK maupun kepolisian keduanya menunjukan penganiyaan memiliki jumlah yang sangat besar dibandingkan kasus lainnya.

Berikut ini merupakan 2 contoh dari insiden penganiyaan yang terjadi, di sekitar Jalan Perumnas IV, Kel. Waena, Distrik Heram, kota Jayapura, Papua, sekitar Senin malam (tgl 31/03/2014) terjadi Insiden penganiyaan yang dilakukan oleh seorang yang tidak dikenal kepada

dilakukan oleh BM dan kawan-kawannya kepada sejumlah mahasiswa yang berada di dalam asrama tersebut. Dalam aksinya para pelaku merusak asrama kemudian merampas Ijazah dan handphone milik mahasiswa, selain itu para pelaku juga mengancam akan membunuh penghuni asrama dan juga 1 mobil dipecahkan kacanya (Cendrawasih Pos 26/03/2014).

Minuman Keras Salah Satu Pemicu Tingginya Angka Kriminalitas

Pengaruh minuman beralkohol di Kota Jayapura terhadap tindak pidana kekerasan sangat dominan, bahkan menjurus pada tindak pidana penganiyaan, pencurian dan lain sebagainya sebagaimana disebutkan diatas, berdasarkan data Polres 356 kasus terjadi karena minuman keras.

Sering dijumpai dalam pemberitaan baik dalam media cetak maupun media elektronik mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman keras. Banyak kasus-kasus hukum yang terjadi akibat dari minuman keras. Masalah minum di Kota Jayapura bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras sudah menjadi hal yang biasa dan merupakan sesuatu hal yang cukup sulit diatasi.

Walaupun salah satu pendapatan daerah di Jayapura adalah berasal dari pajak minuman keras. Namun di sisi lain pengaruh daripada minuman keras menimbulkan banyak masalah dalam hidup bermasyarakat.

Beberapa contoh kasus dampak minuman keras cukup banyak, yaitu terjadinya berbagai tindak kriminalitas antara lain penganiayaan, pencurian, pembunuhan, tindak percabulan, pengrusakan, perkosaan, pembunuhaan, pemalakan yang dapat berujung dengan penganiyaan, dan juga kasus-kasus KDRT yang terjadi dikota Jayapura diakibatkan karena (miras), miras dapat dikatakan sebagai akar ataupun pemicu permasalahan di kota Jayapura.

Hal tersebut juga diakui oleh kepala bidang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kementrian Hukum dan HAM kota Jayapura, bahwa miras merupakan salah pemicu terjadinya tindak kriminalitas (wawancara dengan kabid HAM Kementerian Hukum dan HAM kota Jayapura, 7 Oktober 2014). Hal ini juga diakui oleh ketua Lembaga Pembangunan Masyarakat Asli Papua. Dalam pertemuan FGD hal serupa juga diakui oleh wakil ketua FKUB yang mengatakan bahwa minum keras juga merupakan salah satu pemicu yang cukup tingginya kriminalitas dikota Jayapura ini.

Pengaruh minuman keras terhadap tingginya angka kriminalitas tersebut seperti beberapa kasus yang terjadi, disekitaran Jalan Baru Kotaraja

seorang tukang ojek yang berinisial YU tersebut, awalnya korban yang berprofesi sebagai tukang ojek sedang mengantarkan penumpang hendak kembali ke pangkalan namun beberapa saat kemudian korban dihadang oleh pelaku yang sedang dalam keadaan mabuk, setelah korban dihadang, korban menegur pelaku, karena tidak terima ditegur oleh korban, pelaku justru emosi sehingga melakukan tindak penganiyaan terhadap korban hingga korban mengalami cedera. (Papua Pos, 31/03/2014)

Insiden penganiyaan dan pengrusakan yang terjadi di Jl. Wainan Kali Acai, ini berawal, pada pkl 20.30 WIT, 6 orang masyarakat pegunungan (rekan-rekan Yolanda) sedang berpesta miras di rumah kos yang ditempati oleh Yolanda dan Cherly, kemudian keenam orang tersebut membuat keributan dengan masyarakat pendatang yang juga bermukim di kos milik Hj Jumrahwati, kemudian mereka dikejar oleh warga sekitar, berselang waktu pada pkl 01.15 masyarakat pegunungan ± 30 orang datang dengan membawa sajam dan panah untuk melakukan aksi balas dendam dengan melakukan pengrusakan dan juga penganiyaan para korban kemudian melarikan diri kearah Jl. Baru Tanah Hitam, personel Dalmas dan Polsek Abepura yang dipimpin oleh Kapolsek Abepura tiba di TKP sekitar pkl 02.25. (Papare 2014, hal.7)

Perampokan

Dalam periode ini menurut data kepolisian perampokan juga mendominasi angka kriminalitas di kota Jayapura. Salah satu contoh insiden perampokan yang marak terjadi khususnya di daerah Abepura dan Waena distrik Heram kota Jayapura. Berikut ini contoh insiden perampokan yang terjadi di jalan Kampwolker Perumnas III Waena Distrik Heram, kota Jayapura, pada Selasa malam (29/4/2014) perampokan tersebut menimpa 2 orang wanita, pada awalnya ke 2 wanita tersebut sedang mengendarai motor melewati jalan Kampwolker, Perumnas III Waena, tiba-tiba dihadang oleh pelaku yang menodong korban dengan menggunakan parang kedua korban tidak bisa berbuat apa-apa dan merelakan tasnya diambil oleh pelaku kemudian pelaku langsung lari ke dalam hutan, selanjutnya ke dua korban melaporkan kasus tersebut pada pihak kepolisian untuk ditanggani (Papua Pos, 30/4/2014).

Tidak hanya itu insiden perampokan yang juga cukup menarik perhatian yaitu insiden yang terjadi di Asrama mahasiswa di Perumnas III, Kel. Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua. Terjadi perampokan yang

dilakukan oleh BM dan kawan-kawannya kepada sejumlah mahasiswa yang berada di dalam asrama tersebut. Dalam aksinya para pelaku merusak asrama kemudian merampas Ijazah dan handphone milik mahasiswa, selain itu para pelaku juga mengancam akan membunuh penghuni asrama dan juga 1 mobil dipecahkan kacanya (Cendrawasih Pos 26/03/2014).

Minuman Keras Salah Satu Pemicu Tingginya Angka Kriminalitas

Pengaruh minuman beralkohol di Kota Jayapura terhadap tindak pidana kekerasan sangat dominan, bahkan menjurus pada tindak pidana penganiyaan, pencurian dan lain sebagainya sebagaimana disebutkan diatas, berdasarkan data Polres 356 kasus terjadi karena minuman keras.

Sering dijumpai dalam pemberitaan baik dalam media cetak maupun media elektronik mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman keras. Banyak kasus-kasus hukum yang terjadi akibat dari minuman keras. Masalah minum di Kota Jayapura bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras sudah menjadi hal yang biasa dan merupakan sesuatu hal yang cukup sulit diatasi.

Walaupun salah satu pendapatan daerah di Jayapura adalah berasal dari pajak minuman keras. Namun di sisi lain pengaruh daripada minuman keras menimbulkan banyak masalah dalam hidup bermasyarakat.

Beberapa contoh kasus dampak minuman keras cukup banyak, yaitu terjadinya berbagai tindak kriminalitas antara lain penganiayaan, pencurian, pembunuhan, tindak percabulan, pengrusakan, perkosaan, pembunuhaan, pemalakan yang dapat berujung dengan penganiyaan, dan juga kasus-kasus KDRT yang terjadi dikota Jayapura diakibatkan karena (miras), miras dapat dikatakan sebagai akar ataupun pemicu permasalahan di kota Jayapura.

Hal tersebut juga diakui oleh kepala bidang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kementrian Hukum dan HAM kota Jayapura, bahwa miras merupakan salah pemicu terjadinya tindak kriminalitas (wawancara dengan kabid HAM Kementerian Hukum dan HAM kota Jayapura, 7 Oktober 2014). Hal ini juga diakui oleh ketua Lembaga Pembangunan Masyarakat Asli Papua. Dalam pertemuan FGD hal serupa juga diakui oleh wakil ketua FKUB yang mengatakan bahwa minum keras juga merupakan salah satu pemicu yang cukup tingginya kriminalitas dikota Jayapura ini.

Pengaruh minuman keras terhadap tingginya angka kriminalitas tersebut seperti beberapa kasus yang terjadi, disekitaran Jalan Baru Kotaraja

Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua, terjadi pemalakan yang juga disertai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh 3 OTK terhadap seorang warga setempat berinisial (WE), dalam aksinya para pelaku tersebut dalam keadaan mabuk ataupun sedang dipengaruhi oleh minuman keras, dimana mereka menghadang korban dengan tujuan meminta sejumlah namun permintaan mereka tidak dipenuhi akibatnya mereka melakukan penganiyaan yang menimbulkan korban mengalami cedera (Cenderawasih Pos, 1/1/2014).

Tidak hanya itu hal tersebut juga diakui oleh Kasubid Kekerasan dan Perlindungan Perempuan di kota Jayapura yang menyatakan bahwa minuman keras merupakan pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT (wawancara Kasubid Kekerasan da Perlindungan Perempuan kota Jayapura, 8 Oktober 2014) , seperti pada contoh kasus yang dilakukan oleh ST kepada kedua orangtuanya (ketiganya warga Jalan Padang Bulan IV), karena dipengaruhi oleh minuman keras, pelaku tega memukuli kedua orangtuanya hingga terluka. (03/07/2014), dan juga kasus KDRT (penganiayaan) ataupun insiden yang terjadi dijalan Biak, Distrik Abepura, kota Jayapura, Papua, terjadi insiden KDRT yang dilakukan oleh SM kepada IM (sepasang suami istri dan keduanya warga Jalan Biak, Distrik Abepura), pelaku dalam keadaan mabuk, sehingga ia memukuli korban hingga terluka (Wawancara, 07/07/2014).

Pihak kepolisian membenarkan adanya pengaruh yang sangat kuat dari minuman keras terhadap tingginya angka kriminalitas dikota Jayapura. Dari data yang diperoleh dari pihak kepolisian bahwa tindak kriminalitas yang terjadi dikota Jayapura khususnya mengenai tindak penganiyaan sangat tinggi dalam hal ini penganiyaan tersebut banyak dipicu oleh minuman keras tersebut, hal tersebut dikatakan oleh Kepala Urusan Adminstrasi dan Tata Usaha Reskrim. Sejauh ini upaya-upaya kepolisian dalam hal menanggani tindak kriminalitas dikota Jayapura khususnya yang menyangkut miras dan tindak kekerasan ringan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikenakan tipiring (tindakan pidana ringan), pihak kepolisian juga mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum sejak pada terhadap sekolah-sekolah melalui satuan BIMAS yang ada dikepolisian.

Permasalahan Minuman Keras (Miras) di kota Jayapura perlu diperhatikan, dimana perederan miras dikota Jayapura harus diberhentikan tanpa ada alasan apapun, hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Lembaga Pembangunan Masyarakat Asli Papua (Wawancara, 8 Oktober 2014).

Akibat tidak adanya kebijakan atau Peraturan Daerah yang pasti ataupun tegas terhadap pemberantasan miras dikota jayapura ini sehingga tingkat kriminalitas dikota Jayapura pun semakin meningkat tiap tahunnya, pemerintah kota Jayapura sepertinya membiarkan hal tersebut terjadi, walaupun salah satu pendapatan daerah di Jayapura adalah berasal dari pajak minuman keras. Namun, di sisi lain pengaruh daripada minuman keras menimbulkan banyak masalah dalam hidup bermasyarakat (*Untuk hal ini baca opini Pakar di kajian kebijakan ini*).

Menanggapi hal tersebut Ketua Forum Pemuda Adat Port Numbay menyatakan "kami selalu mendorong agar ada pembatasan, jangan hanya karena urusan pendapatan asli daerah (PAD), membuat orang Papua meninggal dunia karena miras, "Pemerintah Kota juga harus monitor setiap Perda yang berurusan dengan pemasokan miras, kaji secera mendalam, mana izin yang harus dihentikan, mana yang harus dipertahankan, terutama izin pemasokan miras ke Kota Jayapura," tegasnya. Sebab kata Ruddy, tidak bisa untuk menebang pohon, hanya memotong dahannya, namun harus melalui akarnya, artinya jika melarang penjualan miras pada hari Sabtu dan Minggu, sementara pemasoknya tetap berkeliaran bebas, sama saja dengan menghamburkan garam di lautan, artinya kebijakan tersebut tidak akan maksimal. Meski begitu, dirinya menyambut sekali langkah ini, sebagai bentuk program yang nyata dalam rangka meminimalisir angka kriminal di Kota Jayapura (http://www.cenderawasihpos.com, 5/9/2014).

Permasalahan Minuman Keras (Miras) ini merupakan salah satu yang cukup menjadi perhatian dan pemerintah Kota Jayapura saat ini dalam menanggulangi masalah Minuman Keras tersebut telah mengeluarkan PERDA terkait miras sebelumnya sudah ada aturan atau Perda mengenai miras yaitu Perda No.7 Tahun 2008 tentang Pelarangan produksi, pemasokan dan pengawasan, pengendalian, peredaran serta mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Jayapura, namun hal tersebut nampaknya tidak berhasil dalam menanggani perederan miras di Kota Jayapura dikarenakan tidak adanya penegasan dari pihak pemerintah terkait PERDA tersebut.

Faktor-Faktor Pendorong

Adanya peningkatan Jumlah Penduduk Tiap Tahun

Jumlah penduduk di pusat-pusat kota di Indonesia terus meningkat terutama kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua. Pertumbuhan tersebut salah satunya berasal dari kaum migran yang masuk ke Jayapura yang datang dari berbagai daerah baik dari Papua maupun Papua yang mana kebanyakan dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap angka pengangguran di kota Jayapura, sedangkan lapangan kerja yang tersedia relatif terbatas. Hal tersebut juga berpotensi pada peningkatan angka kriminalitas di Kota Jayapura. Berdasarkan data BPS Provinsi Papua, jumlah penduduk kota Jayapura dari tahun 2008-2014 meningkat dengan pesat, hal ini terlihat sejalan dengan tren kriminalitas di Kota Jayapura.

Pertambahan penduduk dikota Jayapura yang kian meningkat setiap tahun, sebagaimana diungkap di profil kota Jayapura sebelumnya, namun selama ini dinas terkait belum secara tegas membatasi atau memperketat arus masuk penduduk dari luar kota Jayapura yang akan masuk dan menetap di kota Jayapura.

Ekonomi berpengaruh terhadap kriminalitas

Dengan adanya pertambahan penduduk dan meningkatnya pengangguran, hal tersebut secara otomatis berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga ekonomi juga merupakan salah satu faktor pendorong tingginya angka kriminalitas, dimana menurut data yang diperoleh dari kepolisian identitas pelaku kriminalitas tersebut kebanyakan berasal dari masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah. Ekonomi biasa dijadikan alasan pembenaran sebagai tempat untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebetuhan hidup sehari-hari, beranggapan tidak ada jalan bagi mereka untuk mendapatkan uang selain melakukan tindak kriminal seperti mencuri, memalak untuk mendapatkan uang, guna memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun tanggung jawab keluarga.

Melihat faktor ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan tindak kriminal.

Penanganan masalah ekonomi dikota Jayapura ditanggapi dengan adanya program perencanaan pembangunan ekonomi dengan kegiatan penunjang program kemiskinan, penyaluran beras orang miskin (raskin), dengan sasaran yang diharapkan adalah terpenuhinya dan terlayaninya kebutuhan pangan bagi orang miskin di Kota Jayapura.

Terkait dengan perekonomian dikota Jayapura pemerintah kota Jayapura mempunyai beberapa kebijakan diantaranya kebijakan pembangunan ekonomi,berupa kebijakan ekonomi seperti adanya penanam modal, pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) dan juga pembinaan Usaha Kecil Menengah bagi para penjual pinang, dll. Upaya pemerintah dalam menangani masalah ekonomi dikota Jayapura cukup baik namun terkadang tidak tepat sasaran dan bantuan tersebut terbatas sedangkan penduduk dengan ekonomi yang rendah cukup banyak di Jayapura.

Pendidikan

Rendahnya Ekonomi juga berpengaruh pada rendahnya pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Tingkat pendidikan masyarakat berhubungan erat dengan tingkat kemajuan yang dicapai. Salah satu permasalahan utama di Papua pada umumnya secara khusus kota Jayapura adalah keterbatasan sumber daya manusianya. (Laporan Penelitian, 17, 20013) Pendidikan juga turut berpengaruh terhadap angka kriminalitas dikota Jayapura, hal tersebut didukung dengan adanya data dari pihak kepolisian Jayapura (Polres) dimana kebanyakan para pelaku tindak kriminalitas adalah orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang rendah, seperti tidak lulus SD dan SMP (Data Kepolisian, 11/11/2014).

Hal tersebut diakibatkan karena bekal pendidikan yang didapat sangat kurang sebagai modal untuk bersaing mencari lapangan kerja, sehingga tidak ada jalan yang harus ditempuh selain melakukan tindak kejahatan seperti mencuri ataupun melakukan pemalakan dan tindak kriminal lainnya.

Hal tersebut diakibatkan karena bekal pendidikan yang didapat sangat kurang sebagai modal untuk bersaing mencari lapangan kerja, sehingga tidak ada jalan yang harus ditempuh selain melakukan tindak kejahatan seperti mencuri ataupun melakukan pemalakan dan tindak kriminal lainnya.

Masalah pendidikan dikota Jayapura, khususya mengenai anak-anak yang putus sekolah dikarenakan terkedala ekonomi tesebut saat ini sudah kebijakan dari pemerintah yaitu adanya bantuan-bantuan ataupun beasiswa yang diberikan pada siswa kurang mampu agar dapat bersekolah dan juga adanya program sekolah gratis yang sedang dijalankan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia, namun pada kenyataannya masih adanya iuran dari pihak sekolah yang cukup tinggi dan juga hal lainnya tidak adanya dukungan dan disiplin dari orang tua.

Rekomendasi

Untuk merespons fenomena kriminalitas dikota Jayapura, kami mengajukan beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan oleh berbagai pihak terkait.

Pihak Kepolisian

Pihak kepolisian dituntut lebih proaktif dalam aspek pengamanan diwilayah-wilayah tertentu yang selama ini kerap menjadi lokasi tindak kejahatan/kriminal, termasuk daerah-daerah yang penerangannya kurang di malam hari. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penambahan personil kepolisian dalam penjagaan dan juga patroli perlu ditingkatkan serta pemberian penerangan listrik yang memdai ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak kriminalitas.

Pemerintah Kota

1. Pemerintah kota Jayapura sesegera mungkin memberlakukan dan mensosialisasikan PERDA Miras di kota Jayapura.
2. Pemerintah kota Jayapura melakukan operasi yustisia kepada warga yang datang dari luar kota Jayapura yang akan dan menetap di kota Jayapura.

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu memberikan teguran kepada sekolah-sekolah yang masih memberikan iuran sekolah yang tinggi.

Pihak Orang Tua

Orang Tua perlu memberikan dukungan, disiplin, bimbingan dan keteladanan dari orang tua kepada anak-anak.

Pihak Agamawan

Agamawan (Pendeta/Pastor/Ustadz) menjalankan peran kenabian dan spiritual untuk meneguhkan iman jemaat dan umatnya agar menjadi umat yang baik, saleh dan terpuji. Dengan kata lain, menjadi umat yang berguna bagi pribadi, keluarga, lingkungan, negara dan agama.

Referensi

Surat Kabar :
Cenderawasih Pos, 11/04/2014
Cenderawasih Pos, 18/2/2014
Cenderawasih Pos 26/03/2014
Cenderawasih Pos, 1/1/2014

Papua Pos, 31/03/2014
Papua Pos, 5/3/2014
Papua Pos, 30/4/2014

Artikel/Jurnal :
Kota Jayapura Dalam Angka Data BPS, 10/11/2014

Wawancara dan FGD:
Wawancara Kabid HAM Kementerian Hukum dan HAM kota Jayapura, 7 Oktober 2014
wawancara Kasubid Kekerasan dan Perlindungan Perempuan kota Jayapura, 8 Oktober 2014
Wawancara Ketua Lembaga Pembangunan Masyarakat Asli Papua , 8 Oktober 2014
Pernyataan wakil ketua FKUB dalam pertemuan FGD, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM 18 Oktober 2014

Website :
(http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=7200, 5/9/2014)
(http://papua.bps.go.id/index.php?hal=subject&id=9)

PLUS MINUS PERDA MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA JAYAPURA

LA MARGONO,SH,MH**

Kota Jayapura merupakan satu-satunya Kota Administratif di Provinsi Papua dan sekaligus merupakan ibu Kota Provinsi Papua. Selain merupakan kota pusat pendidikan untuk Provinsi Papua, Kota Jayapura juga merupakan sentra ekonomi terhadap sebagian kabupaten di Provinsi Papua sehingga kota ini merupakan kota yang maju dan moderen dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik.

Dengan kemajuan kota Jayapura yang begitu cepat dan merupakan kota transit untuk kabupaten lainnya di Provinsi Papua menjadikan Kota Jayapura tidak luput dari berbagai permasalahan sosial maupun permasalahan hukum lainnya yang turut tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan kota termasuk permasalahan peredaran minuman beralkohol atau minuman keras yang sudah merisaukan masyarakat

Akhir-akhir ini peredaran minuman keras di Kota Jayapura mendapat perhatian serius dari pemerintah di Provinsi Papua karena minuman keras merupakan pemicu timbulnya berbagai permasalahan sosial maupun permasalahan hukum. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Ineke Rawar, bahwa Minuman Keras (miras) yang kini masih terus beredar di Provinsi Papua dinilai sebagai salah satu pemicu kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Papua, sehingga pemerintah dan semua elemen masyarakat diharap secara bersama menekan peredaran minuman keras tersebut. Jika perlu tidak boleh beredar lagi di Papua. Selanjutnya dikatakan bahwa menurut evaluasi, maka perlu langkah-langkah serius untuk pelarangan miras di Papua karena akar masalah berbagai kasus kejahatan atau kriminal termasuk KDRT awalnya dari miras. Ditambakan bahwa selain KDRT dampak lain dari miras tersebut adalah banyaknya anak-anak papua yang mati sia-sia di jalan raya, beberapa perempuan papua yang dianiaya hingga meninggal di

dunia. Kasus KDRT lain yang dialami perempuan dan anak-anak di Tanah Papua diantaranya kasus pelecehan seksual, penganiayaan berat dan ringan, ancaman psikis serta beragam masalah sosial yang terus mendera kaum perempuan (Cepos, 15 Agustus 2014 hal, 9).

Sebenarnya yang menjadi korban peredaran minuman keras ini bulan saja merusak perempuan dan anak tetapi juga kaum laki-laki yang menjadi pecandu minuman keras. Terlebih-lebih bagi kaum mudah, dimana mereka merupakan generasi penenus cita-cita perjuangan bangsa kedepan. Merekalah yang menjadi pemimpin negeri dan bangsa ini. Apa jadinya kalau mereka merupakan pecandu minuman keras. Ini berarti masa depan negeri dan bangsa ini kedepan akan suram.

Sadar atau tidak peredaran Minuman keras (miras) di Kota Jayapura sudah memprihatinkan, walaupun perenadaranya dilakukan secara legal. Namun dari sisi pengawasan tentu sangatlah lemah. Aparatur kita hanya menangkap peredaran miras yang ilegal dan masuk di Kota jayapura melalui pelabuhan laut Jayapura maupun melalui bandara sentani. Yang tidak diperhatikan adalah penjual minuman keras ilegal yang banyak menjamur di kota Jayapura. Yang lebih para lagi orang dapat mengkomsumsi minuman keras hampir disetiap pojok di Kota Jayapura, apalagi pada malam, pemandangan mata kita disugukan dengan banyaknya orang-orang yang duduk berteman 2 sampai dengan 7 orang untuk bersama-sama mengkomsumsi minuman keras bahkan di dekat jalan-jalan protokol atau jalan utama.

Pemerintah Kota Jayapura sebenarnya telah tanggap dengan permasalahan Miras di Kota Jayapura. Hal ini dibuktikan dengan pembuatan regulasi untuk menanggulangi peredaran minuman beralkohol berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Mei 2014, Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2014 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 51. Perda ini terdiri dari 13 Bab dan 25 Pasal. Disebutkan dalam Pasal 25 bahwa

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan demikian maka pada tanggal 20 Mei 2014 perda tersebut telah efektif dinyatakan berlaku.

PLUS MINUS PERDA MIRAS

Disadari bersama bahwa produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol tidak bisa sepenuhnya dilarang, mengingat negara memperoleh pendapatan dari cukai minuman yang mengandung etil alkohol mencapai Rp 3,2 triliun hampir setiap tahunnya sementara pendapatan dari etil alkohol dan etanol sebesar Rp 123 miliar.

Disisi lain tidak dapat kita pungkiri bahwa minuman keras sangatlah meresahkan kehidupan sosial dalam masyarakat, minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk dilingkungan masyarakat pemakai. Pengkonsunsumsi minuman keras yang berlebihan tentu menciptakan penyimpangan perilaku negatif hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri (mabuk), yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, sehingga minuman keras acap kali dikatakan sebagai sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Inilah bukti bahwa peredaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol. Dengan kondisi yang seperti ini sehingga pemerintah kota Jayapura bersama DPRD Kota Jayapura telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Dengan berlakunya Perda tersebut diharapkan dapat mengawasi dan mengendalikan sekaligus mengontrol peredaran minuman beralkohol di Kota Jayapura. Ini merupakan harapan semua masyarakat kota Jayapura namun dengan berlakunya Perda tersebut ada beberapa hal yang perlu dicermati bersama yakni :

1. Bahwa kita semestinya berterima kasih pada pemerintah daerah terutama Pemerintah Kota Jayapura dan DPRD Kota Jayapura yang telah menetapkan dan mengundangkan Perda Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
2. Dengan adanya perda miras tesebut secara konkrid telah ditetapkan secara tegas siapa sajakah yang melakukan pengawasan perhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Jayapura. Karena dengan melakukan pengawasan yang melekat terhadap peredaran minuman keras maka orang yang mengkonsumsi minuman keras semakin tertib dan penjualan minun keras hanya dapat dilakukan oleh yang memiliki izin dan hanya dapat dijual pada tempat tertentu saja.
3. Dengan adanya Perda ini berarti bahwa peredaran minuman keras dikota Jayapura dapat di kendalikan agar tidak bebas diperjual belikan disemua tempat akan tetapi hanya dijual ditempat-tempat yang khusus saja dan yang memiliki izin. Dengan demikian tidak semua orang dapat menjual minuman dan memproduksi Minuman Beralkohol dan tersedia tempat untuk mengkonsumsi minuman keras sehingga tidak ada lagi masyarakat atau orang mabuk di jalan-jalan yang meresahkan masyarakat.
4. Berlakunya perda miras ini sangatlah penting karena bagi siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam perda ini tentu akan dihukum dengan hukuman pidana dan denda, pidana paling tinggi 6 Bulan dan Denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
5. Yang perlu diingat bahwa Pemberlakukan perda ini merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian peredaran minuman beralkohol agar kondisi masyarakat bisa kondusip, tidak ada keresahan masyarakat, kehidupan masyarakat lebih aman dan masyarakat dapat hidup dengan tentram menuju kesejateraan.

Perda Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kota Jayapura telah ditetapkan dan diundangkan berlaku tanggal 20 Mei 2014, namun ada beberapa catatan penting sebagai kelemahan pelaksanaan Perda tersebut menurut analisis kami yakni sebagai berikut :

1. Peredaram Minuman Beralkohol di kota Jayapura tidak terlepas dari adanya pemasok serta produksi minuman lokal dengan izin resmi yang tentu mempunyai kontribusi terhadap pemasukan untuk kas daerah. Namun apakah kita lebih mementingkan pemasukan untuk kas daerah ketimbang keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Karena kita ketahui bersama bahwa minuman keras adalah pemicu kriminalitas di kota Jayapura. Hendaknya pemerintah kota Jayapura lebih mementingkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kota Jayapura ketimbang pemasukan terhadap daerah yang merusak generasi muda kota Jayapura ke depan.
2. Perlu dingat bahwa Perda Miras hanya mengatur tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman keras, ini berarti minuman keras masih dapat meredar walau dalam pengendalian dan pengawasan (mengacu pada Perpres 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol). Kita sebagai masyarakat tidak dapat menjamin pengendalian minuman beralkohol dapat terlaksana dengan baik. Karena masyarakat sangat berharap agar orang mabuk yang berkeliaran ataupun penjualan minuman beralkohol disembarang tempat secara ilegal dapat dicegah dapat ditindak tegas, karena yang diimpikan oleh masyarakat adalah bagaimana menghentikan peredaran minuman beralkohol di kota Jayapura, bagaimana menghentikan pengkomsumsi minuman beralkohol agar tidak ada lagi orang mabuk. Bagaimana kita dapat membentuk generasi muda yang handal untuk masa depan negeri dan bangsa ini kalau masih ada peredaran minuman beralkohol dan masih banyak generasih

muda yang terlibat mengkonsumsi minuman beralkohol (mabuk).

3. Kita membutukan pengawas terhadap peredaran minuman beralkohol yang betul-betul mau bekerja dengan hati dan memikirkan masa depan bangsa sehingga mereka lebih bersungguh-sungguh untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman Beralkohol. Karena Pengawasan yang lemah apa bedanya dengan tidak ada regulasiatau aturan. Pengawasan yang lemah berarti sama saja dengan membiarkan peredaran minuman beralkohol tanpa pengendalian dan pengawasan. Ini berarti peredaran minuman beralkohol secara ilegal masih tetap terjadi dan orang mabuk masih tetap berkeliaran.
2. Untuk menghukum mereka yang terlibat dalam peredaran minuman beralkohol secara ilegal atau pengkonsumsi minuman beralkohol (mabuk) di sembarang tempat maka pemerintah hanya mengacu kepada perda masing-masing termasuk kota Jayapura. Hal ini disebabkan karena Pengendalian dan pengawasan minuman Beralkohol peraturan tertingginya adalah Peraturan Presiden. Sedangkan dalam Peraturan Presiden sendiri tidak mempunyai ketentuan sanksi pidana. Ketentuan pidana baru dimasukan setelah diatur dengan Perda sehingga hukumannya terlalu rendah karena perda hukumannya hanya 6 bulan dan atau denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan hukuman yang seperti ini dianggap terlalu rendah dan tidak menimbulkan efek jerah apabila dibandingkan dengan keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol, maka hal ini dapat dimanfaatkan oleh pengedar minuman keras untuk tetap melakukan peredaran minuman beralkohol walaupun sifatnya sembunyi-sembunyi atau ilegal.
3. Sebenarnya masyarakat sudah jenuh dengan dampak dari peredaran minuman keras di kota Jayapura sehingga yang dibutukan oleh masyarakat bukan lagi pengawasan dan

pengendalian peredaran minuman beralkohol tetapi yang masyarakat butukan agar minuman beralkohal tidak lagi diizinkan untuk beredar di Kota Jayapura.

Demikian, pandangan saya terkait plus minus perda miras di kota Jayapura. Semoga bisa menjadi bahan untuk diskusi lebih lanjut sehingga bisa dihasilkan perda miras yang menjawab kebutuhan kota Jayapura yang kita cintai {}{}{}.

** ***Kepala Bidang Hak Asasi Manusia di Kementerian Hukum dan HAM kota Jayapura***

PAPUA PEACE
AND DEVELOPMENT ACTION
(PaPeDA) INSTITUTE

Data SNPK bulan Januari 2014-Juni 2014
mencatat angka kriminalitas telah menembus
332 kasus.
Dalam nada yang sama, data yang dimiliki kepolisian (Papare,
2014) dari bulan
Januari 2014-Juli 2014 menunjukkan
Jumlah kriminalitas mencapai 466 kasus.
Dari total 466 kasus,
berdasarkan data kepolisian tersebut 230 kasus
yang merupakan kasus penganiyaan,
96 penggeroyokan, 28 kasus KDRT dan
beberapa tindak kriminalitas lainnya,
356 kasus tindak kriminal terjadi karena
minuman keras (Data Polres Jayapura, 11/11/2014).
Sedangkan bentuk kriminalitas lainnya
yang terjadi selama periode ini
berdasarkan data SNPK adalah penganiyaan (58%), perampokan
(31%), pengrusakan (10%)
dan perkelahian (1%)

PAPUA PEACE AND DEVELOPMENT ACTION (PePeDA) INSTITUTE

KOTA JAYAPURA

The Habibie Center